



KABUPATEN
LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TANGGAL 10 OKTOBER 2007
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007
(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 19)

DISUSUN DAN DIPERBANYAK OLEH
SUB BAGIAN ANGGARAN
BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA.

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20054574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
Dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula defisit sebesar Rp. (1.020.781.326.000,15) berkurang sejumlah Rp. (40.984.141.116,85) sehingga menjadi sebesar Rp. (42.004.922.443,00) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp 392,637,816,000.00	
	b. (berkurang)	<u>Rp (5,108,666,000.00)</u>	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp 387,529,150,000.00
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp 393,658,597,326.15	
	b. bertambah	<u>Rp 35,875,475,116.85</u>	
	Jumlah belanja setelah perubahan		Rp 429,534,072,443.00
	(Defisit).....		Rp (42,004,922,443.00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp 10,153,781,326.15	
	2) Bertambah	<u>Rp 40,984,141,116.85</u>	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 51,137,922,443.00
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp 9,133,000,000.00	
	2) Tidak Berubah	<u>Rp -</u>	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 9,133,000,000.00
	Pembiayaan Netto		Rp 42,004,922,443.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah Asli Daerah			
1) Semula	Rp	13,500,000,000.00	
2) Bertambah	Rp	<u>1,941,878,000.00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp 15,441,878,000.00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	354,086,590,000.00	
2) Bertambah	Rp	<u>2,914,304,000.00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp 357,000,894,000.00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	25,051,226,000.00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(9,964,848,000.00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp 15,086,378,000.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp	2,551,460,000.00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(1,170,000.00)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp 2,550,290,000.00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	7,518,414,000.00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(41,627,000.00)</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan			Rp 7,476,787,000.00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	250,000,000.00	
2) Bertambah	Rp	<u>32,383,000.00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 282,383,000.00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp	3,180,126,000.00	
2) Bertambah	Rp	<u>1,952,292,000.00</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp 5,132,418,000.00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	173,427,241,717.15	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(13,167,418,203.15)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		160,259,823,514.00
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	220,231,355,609.00	
2) Bertambah	Rp	<u>49,042,893,329.00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp		269,274,248,938.00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	148,865,366,200.00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(18,161,640,000.00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		130,703,726,200.00
b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>962,000,000.00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp		962,000,000.00
b. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	4,483,338,865.00	
2) Bertambah	Rp	<u>37,500,000.00</u>	
Jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp		4,520,838,865.00
d. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/Kota dan pemerintahan desa			
1) Semula	Rp	12,898,809,980.00	
2) Bertambah	Rp	<u>2,177,252,300.00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp		15,076,062,280.00
c. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/Kota dan pemerintahan desa			
1) Semula	Rp	6,078,000,000.00	
2) Bertambah	Rp	<u>55,200,000.00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp		6,133,200,000.00
e. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	1,101,726,672.15	
2) Bertambah	Rp	<u>1,762,269,496.85</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		2,863,996,169.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	29,439,590,000.00	
2) Bertambah	Rp	<u>2,914,304,000.00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp		32,353,894,000.00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	268,664,000,000.00	
2) tidak berubah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp		268,664,000,000.00

c. Dana Alokasi khusus

1) Semula	Rp	55,983,000,000.00	
2) tidak berubah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp		55,983,000,000.00

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp	1,286,502,000.00	
2) bertambah	Rp	<u>129,005,000.00</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp		1,415,507,000.00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp	10,200,000,000.00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(10,200,000,000.00)</u>	
Jumlah Dana Dana Darurat setelah perubahan	Rp		-

c. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	9,164,724,000.00	
2) berkurang	Rp	<u>(893,853,000.00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp		8,270,871,000.00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	4,400,000,000.00	
2) tidak berubah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp		4,400,000,000.00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	-	
2) tidak berubah	Rp	<u>1,000,000,000.00</u>	
Jumlah Dana Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp		1,000,000,000.00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp		51,137,922,443.00
1) Semula	Rp	10,153,781,326.15	
2) Bertambah	Rp	<u>40,984,141,116.85</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		51,137,922,443.00
b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp		9,133,000,000.00
1) Semula	Rp	9,133,000,000.00	
2) tidak berubah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		9,133,000,000.00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Silpa tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp		42,941,359,443.00
1) Semula	Rp	1,957,218,326.15	
2) (Berkurang)	Rp	<u>40,984,141,116.85</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		42,941,359,443.00
b. Penerimaan utang PFK sejumlah	Rp		8,000,000,000.00
1) Semula.	Rp	8,000,000,000.00	
2) tidak berubah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan utang PFK setelah perubahan	Rp		8,000,000,000.00
c. penerimaan dana bergulir bagi kelompok- kelompok usaha unit ekonomi bagi perempuan sejumlah	Rp		6,563,000.00
1) Semula	Rp	6,563,000.00	
2) Bertambah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan dana bergulir bagi kelompok-kelompok usaha unit ekonomi bagi perempuan setelah perubahan	Rp		6,563,000.00
d. penerimaan dana bergulir ketrampilan tenaga kerja institusional sejumlah	Rp		75,000,000.00
1) Semula	Rp	75,000,000.00	
2) tidak berubah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan dana bergulir ketrampilan tenaga kerja institusional setelah perubahan	Rp		75,000,000.00

e. Penerimaan dana bergulir untuk pengembangan industri kecil sejumlah	Rp	115,000,000.00
1) Semula	Rp	115,000,000.00
2) tidak berubah	Rp	_____ -
Jumlah penerimaan dana bergulir untuk pengembangan industri kecil setelah perubahan	Rp	115,000,000.00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (invenstasi) daerah setelah perubahan sejumlah	Rp	1,000,000,000.00
1) Semula	Rp	1,000,000,000.00
2) Tidak Berubah	Rp	_____ -
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp	1,000,000,000.00
b. Pembayaran utang PFK sejumlah	Rp	8,000,000,000.00
1) Semula	Rp	8,000,000,000.00
2) Tidak Berubah	Rp	_____ -
Jumlah pembayaran utang PFK setelah perubahan	Rp	8,000,000,000.00
c. Dana bergulir modal kerja sejumlah	Rp	133,000,000.00
1) Semula	Rp	133,000,000.00
2) Tidak Berubah	Rp	_____ -
Jumlah belanja modal & jasa setelah perubahan	Rp	133,000,000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

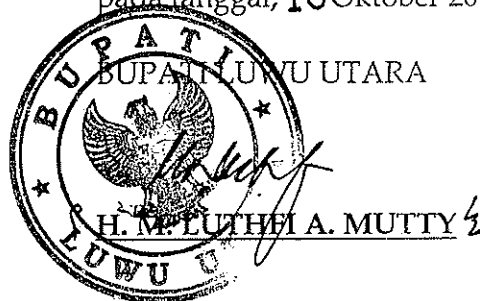
Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 10 Oktober 2007



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Oktober 2007

ELI HARIS DAENI



Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

: Jalan Simpursiang No. 26 ☎ (0473) 21130 Masamba

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf point a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (LN Tahun 1999 Nomor 47, TLN Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lambaran negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Perogram Pembangunan nasional (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 92);
6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Unadang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 53);
8. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
9. Undang-Undang Republik Undonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembran negara Nomor 3848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000, Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000, Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah Dan wakil Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000, Nomor 210, Tambahan Lembaran negara nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Perhatikan : Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Utara tanggal 10 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN

MEMENETAPKAN: Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Kab. Luwu Utara.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan.	
a. Semula.	Rp. 392.637.816.000,-
b. Setelah Perubahan Berkurfang.....	<u>Rp. (5.108.666.000),-</u>
Jumlah	Rp. 387.529150.000,-
2. Belanja.	
a. Semula.	Rp. 393.658.597.326,15,-
b. Setelah Perubahan bertambah.....	<u>Rp. 35.875.475.116,15,-</u>
Jumlah	Rp. 429.534.072.443,00,-

3. Pembiayaan.	
a. Penerimaan.	
- Semula.....	Rp. 10.153.781.326,15,-
- Setelah Perubahan bertambah.....	<u>Rp. 40.984.141.116,85,-</u>
Jumlah	Rp. 51.137.922.443,00,-
b. Pengeluaran.	
- Semula.....	Rp. 9.133.000.000,00,-
- Setelah Perubahan	Rp. -
Jumlah	<u>Rp. 9.133.000.000,00,-</u>

Pasal 2

(1). Ringkasan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

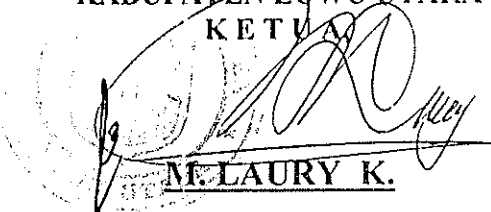
Pasal 4

Setiap perlakuan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, agar tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada Tanggal 10 Oktober 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

K E T U A


M. LAURY K.

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri RI. Di Jakarta**
 2. Gubernur Propensi Sul-Sel di Makassar.
 3. Ketua DPRD Propensi Kabupaten dan Kota se Sul-Sel.
 4. Bupati Luwu Utara di Masamba.
 5. Unsur Muspida Kab. Luwu Utara.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007

OMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN T.A 2007					% ANGGAR AN		
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG			
		C	D	E	F	G			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
	PENDAPATAN DAERAH								
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 1	Pajak Daerah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 2	Retribusi Daerah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 4	Lain-lain Asli Pendapatan Daerah yg Sah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2.	Dana Perimbangan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 2	Dana Alokasi Umum	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 3	Dana Alokasi Khusus	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
3. 1	Hibah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
3. 2	Dana Darurat	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
3. 4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
3. 5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
	BELANJA DAERAH								
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 1	Belanja Pegawai Gaji PNS	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 1a	Belanja Pegawai Gaji Non PNS	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 2	Belanja Bunga	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 3	Belanja Subsidi	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 4	Belanja Hibah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 5	Belanja Bantuan Sosial	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 8	Belanja Tidak Terduga	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2.	Belanja Langsung	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 1	Belanja Pegawai	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 2	Belanja Barang Dan Jasa	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 3	Belanja Modal	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
	Defisit	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
	PEMBIAYAAN DAERAH								
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 1	SH.PA Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 2	Pencairan Dana Cadangan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 7	Penerimaan Utang PFK	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 8	Penerimaan Dana Bergulir Bagi Kelompok-Kelompok Usaha Unit Ekonomi Bagi Perempuan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 9	Penerimaan dana Bergulir Keterampilan Tenaga Kerja Instiusional	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 10	Penerimaan Dana Bergulir untuk Pengembangan Industri Kecil	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1. 11	Penerimaan Piutang Pemda Luwu Utara (TJM Abd.Rahim)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2.	Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 2	Penyerahan Modal (Investasi) Daerah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 3	Pembayaran Pokok Utang	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 5	Pembayaran Utang PFK	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 6	Dana Bergulir Bagi Kelompok-kelompok Usaha Unit Ekonomi Bagi Perempuan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 7	Dana Bergulir Keterampilan Tenaga Instiusional	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 8	Piutang Pemda Luwu Utara	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
2. 9	Dana Bergulir Modal Kerja	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
	SH.PA Anggaran Tahun Berkenaan.....	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYA'
KABUPATEN LUWU UTARA

KE TUA

M. LAURYK

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2007

No.	URAIAN	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
		sebelum perubahan	setelah perubahan	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	392.637.816.000,00	387.529.150.000,00	(5.108.666.000,00)	(1,30)
1	Pendapatan asli daerah	13.500.000.000,00	15.441.878.000,00	1.941.878.000,00	14,38
1.1	Pajak daerah	2.551.460.000,00	2.550.290.000,00	(1.170.000,00)	(0,04)
1.2	Retribusi daerah	7.518.414.000,00	7.476.787.000,00	(41.627.000,00)	(0,55)
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	250.000.000,00	282.383.000,00	32.383.000,00	12,95
1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	3.180.126.000,00	5.132.418.000,00	1.952.292.000,00	61,39
2	Dana perimbangan	354.086.590.000,00	357.000.894.000,00	2.914.304.000,00	0,82
2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	29.439.590.000,00	32.353.894.000,00	2.914.304.000,00	9,89
2.2	Dana alokasi umum	268.664.000.000,00	268.664.000.000,00	0,00	0,00
2.3	Dana alokasi khusus	55.983.000.000,00	55.983.000.000,00	0,00	0,00
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	25.051.226.000,00	15.086.378.000,00	(9.964.848.000,00)	(39,77)
3.1	Hibah	1.286.502.000,00	1.415.507.000,00	120.005.000,00	10,02
3.2	Dana darurat	10.200.000.000,00	0,00	(10.200.000.000,00)	(100,00)
3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	9.164.724.000,00	8.270.871.000,00	(893.853.000,00)	(9,75)
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	392.637.816.000,00	387.529.150.000,00	(5.108.666.000,00)	(1,30)
	BELANJA DAERAH	393.658.597.326,15	429.534.072.443,00	35.875.475.116,85	9,11
1	Belanja Tidak Langsung	173.427.241.717,15	160.269.823.514,00	(13.167.418.203,15)	(7,59)
1.1	Belanja pegawai	148.865.366.200,00	130.703.726.200,00	(18.161.640.000,00)	(12,20)
1.2	Belanja bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja hibah	0,00	962.000.000,00	962.000.000,00	100,00
1.5	Belanja bantuan sosial	4.483.338.865,00	4.520.838.865,00	37.500.000,00	0,83
1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.898.809.980,00	15.076.062.280,00	2.177.252.300,00	16,87
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6.078.000.000,00	6.133.200.000,00	55.200.000,00	0,90
1.8	Belanja tidak terduga	1.101.726.672,15	2.863.996.169,00	1.762.269.496,85	159,95
2	Belanja Langsung	220.231.355.609,00	269.274.248.929,00	49.042.893.320,00	22,26
2.1	Belanja pegawai	24.784.830.746,00	34.691.876.160,00	9.907.045.414,00	39,97
2.2	Belanja barang dan jasa	72.322.995.025,00	85.385.711.238,40	13.062.716.213,40	18,06
2.3	Belanja modal	123.123.529.838,00	149.196.661.530,60	26.073.131.692,60	21,17
	Jumlah Belanja	393.658.597.326,15	429.534.072.443,00	35.875.475.116,85	9,11
	Surplus/(Defisit)	(1.020.781.326,15)	(42.004.922.443,00)	(40.984.141.116,85)	4.014,97
	PEMBIAYAAN DAERAH	1.020.781.326,15	42.004.922.443,00	40.984.141.116,85	4.014,97
1	Penerimaan pembiayaan	10.153.781.326,15	51.137.922.443,00	40.984.141.116,85	403,63
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	1.957.218.326,15	42.941.359.443,00	40.984.141.116,85	2.093,99
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
	sebelum perubahan	setelah perubahan	Rp.	%
2	3	4	5	6
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan piutang PFK	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Bergulir Bagi Kelompok-Kelompok Usaha Unit Ekonomi Bagi Perempuan	6.563.000,00	6.563.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Bergulir Keterampilan Tenaga Kerja Instiusional	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Bergulir Untuk Pengembangan Industri Kecil	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan	10.153.781.326,15	51.137.922.443,00	40.984.141.116,85	403,63
Pengeluaran pembiayaan	9.133.000.000,00	9.133.000.000,00	0,00	0,00
Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan modal (Investasi) daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pembayaran Utang PFK	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
Dana Bergulir Bagi Kelompok-Kelompok Usaha Unit Ekonomi Bagi Perempuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir Keterampilan Instiusional	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pemda LUWU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir Modal Kerja	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan	9.133.000.000,00	9.133.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan neto	1.020.781.326,15	42.004.922.443,00	40.984.141.116,85	***,**
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Oktober 2007



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH

NOMOR : 19 TAHUN 2007

TANGGAL : 10 Oktober 2007

TENTANG PERUBAHAN APBD KAB. LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

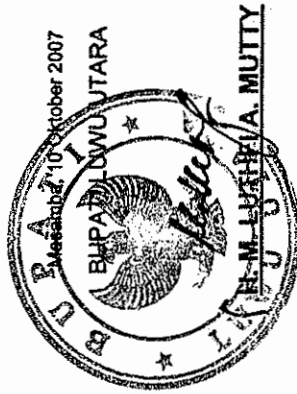
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2007

Kode	SKPD	Pendapatan			Belanja						Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Jumlah Belanja	Jumlah (Rp)	%	
						Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung	Langsung				
1	2	3	4	5	6	Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Jumlah (Rp)	%	
1 01	Pendidikan												
1 01 01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata		0,00	0,00	0,00	73.783.475,000,00	41.612.610,924,00	66.868.762,000,00	50.100.373,424,00	115.401.088,924,00	118.987.137,424,00	1.586.048.500,00	1,38
1 02	Kesehatan												
1 02 01	Dinas Kesehatan	341.885,000,00	344.205,000,00	2.520,000,00	0,73	25.602.178,000,00	21.876.166,800,00	10.325.721,000,00	21.816.694,300,00	47.478.373,800,00	32.142.715,300,00	(18.338.668,500,00)	(32,30)
1 02 02	RSUD Andi Djemma Masamba	4.496.165,000,00	4.495.165,000,00	0,00	0,00	3.872.693,000,00	9.232.200,000,00	5.270.848,000,00	11.425.266,775,00	13.104.763,000,00	18.698.147,775,00	3.581.384,775,00	27,40
1 03	Pekerjaan Umum												
1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum	574.866,000,00	579.666,000,00	5.000,000,00	0,88	1.296.039,000,00	71.369,126,730,00	1.657.779,000,00	88.174.347,228,00	72.605.165,730,00	87.832.126,228,00	15.228.960,498,00	20,97
1 04	Perumahan												
1 04 05	Penataan Ruang												
1 04 08	Perencanaan Pembangunan												
1 04 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0,00	0,00	0,00	769.892,000,00	3.781.789,950,00	988.756,000,00	4.349.581,200,00	4.551.881,950,00	5.338.337,200,00	799.655,250,00	17,28
1 07	Perhubungan												
1 07 01	Dinas Perhubungan	360.000,000,00	380.016,000,00	16.000,00	0,00	505.625,000,00	5.341.600,000,00	752.949,000,00	6.463.317,225,00	5.847.225,000,00	7.218.266,225,00	1.371.041,225,00	23,44
1 08	Lingkungan Hidup												
1 08 09	Pertanahan												
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil												
1 10 01	Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	142.815,000,00	142.815,000,00	0,00	0,00	1.942.481,000,00	3.208.822,380,00	2.213.536,000,00	3.633.344,380,00	5.151.303,380,00	5.848.860,380,00	695.577,000,00	13,50
1 11	Pemberdayaan Perempuan												
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera												
1 13	Sosial												
1 13 01	Dinas Kesejahteraan Sosial	300,000,00	300,000,00	0,00	0,00	696.452,000,00	6.608,773,125,00	779.842,000,00	7.017.753,574,00	7.305.225,125,00	7.797.595,574,00	492.370,449,00	6,73
1 14	Tenaga Kerja												
1 14 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.200,000,00	3.200,000,00	0,00	0,00	1.055.660,000,00	1.328,000,000,00	1.235,051,000,00	1.440,468,000,00	2.383,660,000,00	2.675,507,000,00	291.827,000,00	12,24
1 15	Koperasi dan UKM												
1 15 01	Dinas Koperasi dan Penanaman Modal	128.000,000,00	128.000,000,00	0,00	0,00	816,010,000,00	1.256,148,000,00	1.042,660,000,00	1.830,943,950,00	2.072,158,000,00	2.573,503,950,00	501.343,950,00	24,19
1 16	Penanaman Modal												
1 17	Kebudayaan												
1 17 01	Pemuda dan Cegah Raga												

Kode	SKPD	Pendapatan				Belanja				Bertambah (Berkurang)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Jumlah (Rp)	%		
						Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung	Langsung				
1	2												
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
1 19 01	Kantor Kesbang dan Limas	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	66,66	400.428.000,00	1.383.917.000,00	1.784.346.000,00	890.897.000,00	1.568.870.000,00	464.991.000,00	26,05	
1 20	Pemerintahan Umum												
1 20 01	DPD		0,00	0,00	0,00	8.284.453.200,00	4.470.083.200,00	8.284.453.200,00	4.470.083.200,00	4.470.083.200,00	(3.814.390.000,00)	(48,04)	
1 20 02	KDH & WKDH		0,00	0,00	0,00	361.806.000,00	16.178.718.100,00	66.197.707.117,15	448.806.000,00	24.088.883.076,00	85.000.000,00	23,48	
1 20 03	Sekretariat Daerah	342.745.088.000,00	335.500.233.000,00	(7.244.825.000,00)	(2,11)	40.011.991.017,15	3.891.053.500,00	4.471.740.500,00	45.524.594.814,00	7.988.983.500,00	13.428.770.771,85	23,88	
1 20 04	Sekretariat DPRD		0,00	0,00	0,00	774.528.000,00	1.491.132.800,00	2.265.658.500,00	1.001.925.000,00	2.003.391.500,00	4.350.152.500,00	97,28	
1 20 05	Badan Pengawasan Daerah		0,00	0,00	0,00	2.028.970.000,00	3.960.278.000,00	6.298.948.000,00	3.942.974.000,00	3.642.391.000,00	7.986.658.000,00	32,64	
1 20 06	Dinas Pendapatan Daerah	42.828.064.000,00	44.847.130.000,00	2.219.036.000,00	5,20	279.370.000,00	108.430.000,00	384.900.000,00	333.272.000,00	112.930.000,00	81.402.000,00	15,98	
1 20 07	Pemerintah Kecamatan Sebang	78.490.000,00	69.030.000,00	(9.450.000,00)	(12,04)	188.147.000,00	110.890.000,00	298.827.000,00	390.748.000,00	118.180.000,00	498.928.000,00	66,98	
1 20 08	Pemerintah Kecamatan Baebun	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	198.998.000,00	108.420.000,00	297.098.000,00	202.654.000,00	118.920.000,00	21.486.000,00	7,23	
1 20 09	Pemerintah Kecamatan Limbong	350.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	285,71	205.287.000,00	122.050.000,00	327.337.000,00	224.425.000,00	129.550.000,00	28.638.000,00	8,13	
1 20 10	Pemerintah Kecamatan Sako	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	84.300.000,00	107.470.000,00	181.770.000,00	94.300.000,00	114.970.000,00	7.500.000,00	3,91	
1 20 11	Pemerintah Kecamatan Rampi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	173.315.000,00	118.130.000,00	289.448.000,00	198.091.000,00	123.830.000,00	(27.754.000,00)	(9,58)	
1 20 12	Pemerintah Kecamatan Mangka	3.500.000,00	4.225.000,00	725.000,00	20,71	194.800.000,00	120.000.000,00	314.800.000,00	223.744.000,00	190.000.000,00	39.144.000,00	12,44	
1 20 13	Pemerintah Kecamatan Mangka Barat	13.908.000,00	11.740.000,00	(2.168.000,00)	(15,58)	831.480.000,00	117.090.000,00	948.590.000,00	797.124.000,00	127.080.000,00	(24.396.000,00)	(2,55)	
1 20 14	Pemerintah Kecamatan Mesebbe	288.100.000,00	228.300.000,00	(42.800.000,00)	(15,90)	273.985.000,00	112.200.000,00	395.895.000,00	308.400.000,00	119.700.000,00	42.215.000,00	10,93	
1 20 15	Pemerintah Kecamatan Mappedeang	13.620.000,00	13.920.000,00	300.000,00	2,20	369.798.000,00	103.650.000,00	473.448.000,00	440.158.000,00	111.150.000,00	77.899.000,00	18,44	
1 20 16	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	144.800.000,00	118.880.000,00	(25.920.000,00)	(17,90)	328.668.000,00	111.750.000,00	441.318.000,00	396.287.000,00	119.250.000,00	44.189.000,00	10,01	
1 20 17	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	47.220.000,00	47.220.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	82.000.000,00	84.500.000,00	22.500.000,00	87.000.000,00	6.000.000,00	5,91	
1 20 18	Pemerintah Kelurahan Kappuna	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	(14,28)	29.550.000,00	82.000.000,00	91.550.000,00	29.550.000,00	87.000.000,00	5.000.000,00	5,48	
1 20 19	Pemerintah Kelurahan Bone	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	28.550.000,00	82.000.000,00	88.550.000,00	22.500.000,00	87.000.000,00	850.000,00	1,07	
1 20 20	Pemerintah Kelurahan Kaibong	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	31.500.000,00	82.000.000,00	93.500.000,00	32.300.000,00	71.500.000,00	10.700.000,00	11,44	
1 20 21	Pemerintah Kelurahan Ballase					851.189.000,00	3.812.050.000,00	4.463.219.000,00	814.575.000,00	4.137.282.800,00	488.638.800,00	10,94	
1 21	Kepagawalan	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	329.434.000,00	3.801.888.000,00	3.931.322.000,00	324.218.000,00	4.701.898.000,00	1.094.594.000,00	27,94	
1 21 01	Badan Kepegawalan Daerah		0,00	0,00	0,00	428.274.000,00	1.302.100.000,00	1.728.374.000,00	474.388.000,00	1.503.377.000,00	249.391.000,00	14,42	
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)								
1 22 01	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa												
1 22 02	Badan Penelitian Dan Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan												
1 23	Statistik												
1 24	Kearsipan												
1 25	Komunikasi dan Informatika												
1 26	Kantor Pengolahan Data Elektrik												
2 01	Pertanian												
2 01 01	Dinas Pertanian dan Kelautan	198.051.000,00	138.251.000,00	(59.800.000,00)	0,14	2.709.843.000,00	11.798.788.500,00	14.476.428.500,00	3.710.713.000,00	13.453.499.500,00	2.688.754.000,00	18,57	
2 02	Kehutanan												
2 02 01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	434.650.000,00	434.650.000,00	0,00	0,00	1.944.838.000,00	2.438.800.000,00	4.284.738.000,00	2.233.887.000,00	5.948.718.500,00	3.888.887.500,00	90,98	
2 03	Energi dan Sumberdaya Mineral												
2 03 01	Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup	10.915.000,00	10.915.000,00	0,00	0,00	610.373.000,00	2.397.858.800,00	3.008.228.800,00	748.737.000,00	3.361.527.200,00	1.100.034.600,00	38,68	
2 04	Parwisata												

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	PEMBIAYAAN			SILPA TAB	PEMBIAYAAN		
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO
1	2	3	4	5	6	3	4	5
1	URUSAN WAJIB	10.153.781.328,15	9.133.000.000,00	1.020.781.328,15		51.137.922.443,00	9.133.000.000,00	42.004.922.443,00
1	Pemerintahan Umum	10.153.781.328,15	9.133.000.000,00	1.020.781.328,15		51.137.922.443,00	9.133.000.000,00	42.004.922.443,00
1	03 Sekretariat Daerah	10.153.781.328,15	9.133.000.000,00	1.020.781.328,15		51.137.922.443,00	9.133.000.000,00	42.004.922.443,00

Kode	SKPD	Pendapatan			Belanja				Bertambah/ (Berkurang)				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Jumlah (Rp)	%			
1		3	4	5	6								
2	Kelautan dan Perikanan												
2 05	Perdagangan												
2 06	Perindustrian												
2 07	Transmigrasi												
2 08													
	Jumlah	392.837.818.000,00	387.829.150.000,00	-5.108.668.000,00	(1,30)	173.427.241.717,15	220.231.355.609,00	393.658.897.326,15	190.269.823.614,00	269.274.248.929,00	439.634.072.443,00	34.876.478.118,85	9,11
	Surplus/(Defisit)												



LAMPIRAN II B PERATURAN DAERAH

NOMOR : 19 TAHUN 2007

TANGGAL : 10 Oktober 2007

TENTANG PERUBAHAN APBD KAB. LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja						Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Jumlah Belanja	Langsung	Tidak Langsung	Jumlah (Rp)	%
						Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung	Langsung					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	URUSAN WAJIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	73.788.478.000,00	41.188.810.924,00	114.948.038.924,00	68.888.782.000,00	49.288.378.424,00	118.183.137.424,00	1.205.048.500,00	1,04	
1 01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	73.788.478.000,00	41.188.810.924,00	114.948.038.924,00	68.888.782.000,00	49.288.378.424,00	118.183.137.424,00	1.205.048.500,00	1,04	
1 02	Kesehatan	4.838.850.000,00	4.839.370.000,00	2.820.000,00	0,00	29.474.741.000,00	31.108.388.800,00	80.883.138.800,00	16.596.689.000,00	33.242.294.075,00	48.838.983.075,00	(11.744.273.725,00)	(19,38)	
1 02	Dinas Kesehatan	341.885.000,00	344.205.000,00	2.520.000,00	0,73	25.802.178.000,00	21.878.198.800,00	47.478.373.800,00	10.325.721.000,00	21.816.994.300,00	32.142.715.300,00	(15.335.858.500,00)	(32,30)	
1 02	RSUD Andi Djemma Masamba	4.495.185.000,00	4.495.185.000,00	8.000.000,00	0,00	3.872.583.000,00	9.232.200.000,00	13.104.783.000,00	5.270.848.000,00	11.425.299.775,00	18.998.147.775,00	3.591.384.775,00	27,40	
1 03	Pekerjaan Umum	574.895.000,00	579.895.000,00	5.000.000,00	0,88	1.284.039.000,00	89.114.890.898,00	70.410.929.898,00	1.857.778.600,00	78.305.782.787,40	77.963.861.787,40	7.582.631.889,40	10,77	
1 03	Dinas Pekerjaan Umum	574.895.000,00	579.895.000,00	5.000.000,00	0,88	1.284.039.000,00	89.114.890.898,00	70.410.929.898,00	1.857.778.600,00	78.305.782.787,40	77.963.861.787,40	7.582.631.889,40	10,77	
1 03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	483.200.000,00	483.200.000,00	183.200.000,00	54,40	
1 04	Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	78.739.743,00	78.739.743,00	3.739.743,00	4,98	
1 04	Dinas Kesejahteraan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	78.739.743,00	78.739.743,00	3.739.743,00	4,98	
1 05	Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.241.000,00	278.241.000,00	0,00	308.241.000,00	308.241.000,00	30.000.000,00	10,88	
1 05	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	
1 05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.241.000,00	255.241.000,00	0,00	255.241.000,00	255.241.000,00	0,00	0,00	
1 06	Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	789.892.000,00	3.248.134.850,00	4.019.028.950,00	988.758.000,00	3.812.828.200,00	4.801.382.200,00	782.355.250,00	19,44	
1 06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	789.892.000,00	3.184.134.850,00	3.964.028.950,00	988.758.000,00	3.757.828.200,00	4.748.382.200,00	782.355.250,00	19,73	
1 06	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1 07	Perhubungan	380.000.000,00	380.016.000,00	18.000,00	0,00	505.823.000,00	5.341.800.000,00	8.847.225.000,00	752.949.000,00	6.486.317.225,00	7.218.286.225,00	1.371.041.225,00	23,44	
1 07	Dinas Perhubungan	380.000.000,00	380.016.000,00	18.000,00	0,00	505.823.000,00	5.341.800.000,00	8.847.225.000,00	752.949.000,00	6.486.317.225,00	7.218.286.225,00	1.371.041.225,00	23,44	
1 08	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.058.800,00	1.545.058.800,00	0,00	1.897.804.400,00	1.897.804.400,00	182.847.600,00	9,87	
1 08	Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.058.800,00	1.545.058.800,00	0,00	1.897.804.400,00	1.897.804.400,00	152.547.600,00	9,87	
1 09	Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000.000,00	910.000.000,00	0,00	1.833.080.000,00	1.833.080.000,00	923.080.000,00	101,43	
1 09	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000.000,00	910.000.000,00	0,00	1.833.080.000,00	1.833.080.000,00	923.080.000,00	101,43	
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil	142.815.000,00	142.815.000,00	0,00	0,00	1.942.481.000,00	1.357.951.280,00	3.300.432.280,00	2.213.538.000,00	1.782.783.280,00	3.998.319.280,00	698.887.000,00	21,08	
1 10	Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	142.815.000,00	142.815.000,00	0,00	0,00	1.942.481.000,00	1.357.951.280,00	3.300.432.280,00	2.213.538.000,00	1.782.783.280,00	3.998.319.280,00	698.887.000,00	21,08	
1 11	Pembudayaan Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	25.000.000,00	17,24	
1 11	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	25.000.000,00	17,24	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan					Belanja					Bertambah/ (Berkurang)		
		3	4	5	6	%	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			13	%
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.581.100,00	1.850.581.100,00	0,00	1.850.581.100,00	1.850.581.100,00	(310.000,00)	(0,01)	
1 13	Bedan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.581.100,00	1.850.581.100,00	0,00	1.850.581.100,00	1.850.581.100,00	(310.000,00)	(0,01)	
1 13.01	Sosial	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.801.023.125,00	7.499.478.125,00	779.842.000,00	7.246.013.831,00	8.028.358.831,00	528.386.706,00	7,01	
1 13.02	Dinas Kesejahteraan Sosial	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.531.773.125,00	7.230.225.125,00	779.842.000,00	8.939.013.831,00	7.718.855.831,00	488.830.706,00	6,75	
1 13.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.250.000,00	289.250.000,00	0,00	307.000.000,00	307.000.000,00	37.750.000,00	14,02	
1 14	Tenaga Kerja	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	894.000.000,00	1.949.880.000,00	1.235.051.000,00	900.300.000,00	2.138.351.000,00	189.971.000,00	9,52	
1 14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	894.000.000,00	1.949.880.000,00	1.235.051.000,00	900.300.000,00	2.138.351.000,00	189.971.000,00	9,52	
1 15	Koperasi dan UKM	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	0,00	728.528.000,00	1.542.538.000,00	1.042.640.000,00	835.977.950,00	1.878.637.950,00	338.999.950,00	21,78	
1 15.01	Dinas Koperasi dan Penanaman Modal	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	0,00	728.528.000,00	1.542.538.000,00	1.042.640.000,00	795.977.950,00	1.808.637.950,00	289.099.950,00	17,25	
1 16	Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	179.000.000,00	170.000.000,00	38.000.000,00	25,94	
1 16.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	35.000.000,00	35,00	
1 16.15.01	Dinas Koperasi dan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1 17	Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	
1 17.01.01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	
1 18	Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 19	Keastuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	89,89	400.428.000,00	1.383.917.000,00	1.784.348.000,00	980.867.000,00	1.968.970.000,00	2.249.337.000,00	464.991.000,00	28,06	
1 19.01	Kantor Keabang dan Linmas	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	89,89	400.428.000,00	1.383.917.000,00	1.784.348.000,00	980.867.000,00	1.968.970.000,00	2.249.337.000,00	464.991.000,00	28,06	
1 20	Pemerintahan Umum	385.987.640.000,00	890.851.238.000,00	5.106.402.000,00	(1,32)	85.878.481.717,15	26.718.023.432,00	82.893.478.149,15	89.825.274.814,00	48.553.438.013,89	105.378.710.527,89	22.785.235.379,48	27,58	
1 20.01	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284.453.200,00	4.470.063.200,00	0,00	4.470.063.200,00	(3.814.390.000,00)	(48,04)	
1 20.02	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.235.832,00	2.474.235.832,00	0,00	10.318.784.439,90	10.318.784.439,90	7.844.528.608,90	317,04	
1 20.03	Sekretariat Daerah	342.745.058.000,00	335.500.233.000,00	(7.244.825.000,00)	(2,11)	40.011.991.017,15	13.725.488.100,00	53.737.457.117,15	45.524.594.814,00	20.041.645.573,00	65.568.240.399,00	11.828.783.271,85	23,46	
1 20.04	Bedan Pengawasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.808.000,00	381.808.000,00	448.808.000,00	0,00	448.808.000,00	85.000.000,00	22,01	
1 20.05	Dinas Pendataan Daerah	42.828.094.000,00	44.847.130.000,00	2.218.038.000,00	5,20	2.828.670.000,00	3.850.278.000,00	6.288.948.000,00	3.942.974.000,00	3.605.391.000,00	7.548.395.000,00	1.281.418.000,00	20,06	
1 20.06	Pemerintah Kecamatan Sabrang	78.480.000,00	69.030.000,00	(9.450.000,00)	(12,04)	279.370.000,00	105.430.000,00	384.800.000,00	333.272.000,00	112.830.000,00	446.202.000,00	81.402.000,00	15,92	
1 20.07	Pemerintah Kecamatan Baebunta	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	188.868.000,00	110.880.000,00	298.827.000,00	380.749.000,00	116.180.000,00	498.929.000,00	200.102.000,00	66,92	
1 20.08	Pemerintah Kecamatan Limbong	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	205.287.000,00	122.080.000,00	327.337.000,00	224.425.000,00	115.920.000,00	353.975.000,00	26.638.000,00	9,13	
1 20.09	Pemerintah Kecamatan Seko	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	84.300.000,00	107.470.000,00	191.770.000,00	84.300.000,00	114.970.000,00	199.270.000,00	7.500.000,00	3,91	
1 20.10	Pemerintah Kecamatan Rempil	3.500.000,00	4.225.000,00	725.000,00	20,71	173.315.000,00	118.130.000,00	289.445.000,00	138.081.000,00	123.639.000,00	281.891.000,00	(27.754.000,00)	(9,58)	
1 20.11	Pemerintah Kecamatan Malengke	13.908.000,00	11.740.000,00	(2.168.000,00)	(15,59)	194.900.000,00	120.000.000,00	314.900.000,00	223.744.000,00	130.000.000,00	353.744.000,00	39.744.000,00	12,44	
1 20.12	Pemerintah Kecamatan Malengke Barat	289.100.000,00	228.300.000,00	(42.800.000,00)	(15,90)	871.480.000,00	117.080.000,00	948.560.000,00	787.124.000,00	127.080.000,00	924.204.000,00	(24.356.000,00)	(2,56)	
1 20.13	Pemerintah Kecamatan Mappedecong	13.820.000,00	13.820.000,00	0,00	0,00	273.685.000,00	112.200.000,00	393.885.000,00	308.400.000,00	118.700.000,00	428.100.000,00	42.215.000,00	10,92	
1 20.14	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	144.800.000,00	118.890.000,00	(25.920.000,00)	(17,90)	399.798.000,00	103.850.000,00	473.449.000,00	440.156.000,00	111.150.000,00	551.306.000,00	77.859.000,00	16,44	
1 20.15	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	47.220.000,00	47.220.000,00	0,00	0,00	329.588.000,00	111.760.000,00	441.318.000,00	368.267.000,00	119.260.000,00	485.517.000,00	44.199.000,00	10,01	
1 20.16	Pemerintah Kelurahan Kappuna	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	22.500.000,00	82.000.000,00	84.500.000,00	22.500.000,00	87.000.000,00	88.500.000,00	5.000.000,00	5,91	
1 20.17	Pemerintah Kelurahan Bone	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	(14,29)	28.550.000,00	62.000.000,00	91.550.000,00	29.550.000,00	67.000.000,00	96.550.000,00	5.000.000,00	5,48	
1 20.18	Pemerintah Kelurahan Kesimbong	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	28.550.000,00	62.000.000,00	88.550.000,00	22.500.000,00	67.000.000,00	89.500.000,00	950.000,00	1,07	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja				Bertambah (Berkurang)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan					
						Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung	Langsung				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.871.100,00	1.850.871.100,00	0,00	1.850.871.100,00	1.850.871.100,00	(310.000,00)	(0,01)
1 12	Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.871.100,00	1.850.871.100,00	0,00	1.850.871.100,00	1.850.871.100,00	(310.000,00)	(0,01)
1 13	Sosial	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.901.023.125,00	7.499.478.125,00	779.842.000,00	7.248.013.831,00	8.025.855.831,00	528.388.708,00	7,01
1 13	Dinas Kesejahteraan Sosial	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.988.452.000,00	7.230.225.125,00	779.842.000,00	6.939.013.831,00	7.718.855.831,00	489.630.708,00	6,75
1 13	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.250.000,00	289.250.000,00	0,00	307.000.000,00	307.000.000,00	37.750.000,00	14,02
1 14	Tenaga Kerja	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	894.000.000,00	1.949.890.000,00	1.235.081.000,00	909.300.000,00	2.135.351.000,00	185.871.000,00	9,82
1 14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	894.000.000,00	1.949.890.000,00	1.235.051.000,00	900.300.000,00	2.135.351.000,00	185.871.000,00	9,52
1 15	Koperasi dan UKM	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	0,00	729.528.000,00	1.542.538.000,00	1.042.860.000,00	835.977.960,00	1.878.837.960,00	336.999.960,00	21,78
1 15	Dinas Koperasi dan Penanaman Modal	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	0,00	729.528.000,00	1.542.538.000,00	1.042.660.000,00	785.977.960,00	1.808.837.960,00	286.099.960,00	17,22
1 16	Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	170.030.000,00	170.030.000,00	35.030.000,00	35,00
1 16	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	35.030.000,00	35,00
1 16	Dinas Koperasi dan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.030.000,00	35.030.000,00	30.000,00	0,08
1 17	Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00
1 17	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00
1 18	Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	69,99	400.429.000,00	1.383.917.000,00	1.784.348.000,00	880.887.000,00	1.568.870.000,00	2.249.337.000,00	464.991.000,00	28,06
1 19	Kantor Kesbang dan Litmas	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	66,66	400.429.000,00	1.383.917.000,00	1.784.348.000,00	880.887.000,00	1.568.870.000,00	2.249.337.000,00	464.991.000,00	28,06
1 20	Pemerintahan Umum	385.987.640.000,00	380.861.238.000,00	(5.108.402.000,00)	(1,32)	85.878.481.717,15	26.718.023.432,00	82.593.478.149,15	59.825.274.514,00	45.353.438.013,80	105.378.710.827,86	22.785.238.378,45	27,54
1 20	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284.453.200,00	0,00	8.284.453.200,00	4.470.063.200,00	0,00	4.470.063.200,00	(3.814.390.000,00)	(46,04)
1 20	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	361.808.000,00	0,00	361.808.000,00	446.808.000,00	0,00	446.808.000,00	85.000.000,00	23,45
1 20	KDH & WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	40.011.991.017,15	13.725.488.100,00	53.737.457.117,15	45.524.594.814,00	20.041.845.575,00	65.588.240.388,00	11.828.783.271,85	22,01
1 20	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	590.887.500,00	3.981.053.000,00	4.471.740.500,00	832.909.500,00	7.989.983.500,00	8.821.883.000,00	4.350.152.500,00	97,28
1 20	Badan Pengawasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	774.528.000,00	1.491.132.500,00	2.265.658.500,00	1.001.925.000,00	2.003.391.500,00	3.005.318.500,00	798.658.000,00	32,64
1 20	Dinas Pendapusan Daerah	42.828.094.000,00	44.847.130.000,00	2.218.038.000,00	5,20	2.828.870.000,00	3.890.278.000,00	6.288.848.000,00	3.942.874.000,00	3.605.391.000,00	7.548.395.000,00	1.281.419.000,00	20,06
1 20	Pemerintah Kecamatan Sabbang	78.480.000,00	69.030.000,00	(9.450.000,00)	(12,04)	279.370.000,00	105.430.000,00	384.800.000,00	333.272.000,00	112.830.000,00	446.202.000,00	91.402.000,00	15,92
1 20	Pemerintah Kecamatan Baebunta	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	188.147.000,00	110.880.000,00	298.827.000,00	380.749.000,00	118.180.000,00	498.829.000,00	200.102.000,00	68,96
1 20	Pemerintah Kecamatan Limbong	350.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	285,71	188.688.000,00	108.420.000,00	297.088.000,00	202.654.000,00	115.920.000,00	318.574.000,00	21.488.000,00	7,22
1 20	Pemerintah Kecamatan Sako	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	205.287.000,00	122.050.000,00	327.337.000,00	224.425.000,00	129.550.000,00	353.975.000,00	26.638.000,00	8,12
1 20	Pemerintah Kecamatan Rempel	360.000,00	350.000,00	(10.000,00)	(2,78)	84.300.000,00	107.470.000,00	191.770.000,00	84.300.000,00	114.970.000,00	199.270.000,00	7.500.000,00	3,91
1 20	Pemerintah Kecamatan Malengke	3.500.000,00	4.225.000,00	725.000,00	20,71	173.315.000,00	116.130.000,00	289.445.000,00	138.081.000,00	123.630.000,00	281.691.000,00	(27.754.000,00)	(9,58)
1 20	Pemerintah Kecamatan Malengke Barat	13.908.000,00	11.740.000,00	(2.168.000,00)	(15,59)	194.600.000,00	120.000.000,00	314.600.000,00	223.744.000,00	130.000.000,00	353.744.000,00	39.144.000,00	12,44
1 20	Pemerintah Kecamatan Miasamba	289.100.000,00	228.300.000,00	(60.800.000,00)	(21,03)	831.480.000,00	117.080.000,00	948.560.000,00	797.124.000,00	127.080.000,00	924.204.000,00	(24.356.000,00)	(2,56)
1 20	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	144.800.000,00	118.890.000,00	(25.920.000,00)	(17,90)	273.885.000,00	112.200.000,00	385.885.000,00	308.400.000,00	119.700.000,00	428.100.000,00	42.315.000,00	10,82
1 20	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	47.220.000,00	47.220.000,00	0,00	0,00	329.588.000,00	111.750.000,00	64.500.000,00	388.287.000,00	119.250.000,00	485.517.000,00	44.199.000,00	10,01
1 20	Pemerintah Kecamatan Sukumaju	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	22.500.000,00	62.000.000,00	64.500.000,00	22.500.000,00	67.000.000,00	89.500.000,00	5.000.000,00	5,91
1 20	Pemerintah Kelurahan Kappuna	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	(14,28)	29.550.000,00	62.000.000,00	91.550.000,00	29.550.000,00	67.000.000,00	96.550.000,00	5.000.000,00	5,44
1 20	Pemerintah Kelurahan Bone	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	28.550.000,00	62.000.000,00	88.550.000,00	22.500.000,00	67.000.000,00	89.500.000,00	950.000,00	1,07

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja				Setelah Perubahan			Bertambah (Berkurang)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
														Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1 20	1.20.21	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	31.500.000,00	62.000.000,00	93.500.000,00	32.300.000,00	71.900.000,00	104.200.000,00	10.700.000,00	11,44	10.700.000,00	11,44
1 21	1.21.01	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	661.189.000,00	3.912.060.000,00	4.463.219.000,00	814.676.000,00	4.176.282.800,00	4.989.987.800,00	528.638.800,00	11,77	528.638.800,00	11,77
1 21	1.21.01	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	651.189.000,00	3.812.060.000,00	4.463.219.000,00	814.676.000,00	4.137.282.800,00	4.951.857.800,00	488.638.800,00	10,94	488.638.800,00	10,94
1 22	1.22.01	26.000.000,00	10.000.000,00	(16.000.000,00)	(60,00)	768.708.000,00	6.263.988.000,00	6.019.896.000,00	798.806.000,00	6.644.086.500,00	7.442.861.500,00	1.422.965.000,00	23,63	1.422.965.000,00	23,63
1 22	1.22.01	26.000.000,00	10.000.000,00	(16.000.000,00)	(60,00)	329.434.000,00	3.901.868.000,00	3.631.322.000,00	324.218.000,00	4.701.888.000,00	5.025.908.000,00	1.094.584.000,00	27,84	1.094.584.000,00	27,84
1 22	1.22.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	438.980.500,00	438.980.500,00	78.980.500,00	21,94	78.980.500,00	21,94
1 22	1.22.02	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	428.274.000,00	1.302.100.000,00	1.728.374.000,00	474.388.000,00	1.503.377.000,00	1.977.785.000,00	248.381.000,00	14,42	248.381.000,00	14,42
1 23	1.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.414.000,00	332.414.000,00	0,00	336.714.000,00	336.714.000,00	4.300.000,00	1,28	4.300.000,00	1,28
1 23	1.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.414.000,00	332.414.000,00	0,00	336.714.000,00	336.714.000,00	4.300.000,00	1,28	4.300.000,00	1,28
1 24	Keerajaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 25	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	232.132.000,00	1.971.954.000,00	1.803.786.000,00	315.460.000,00	1.932.290.800,00	2.147.720.800,00	343.934.800,00	19,04	343.934.800,00	19,04
1 25	Kantor Pengolahan Data Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	232.132.000,00	1.280.854.000,00	1.512.788.000,00	315.460.000,00	1.324.293.800,00	1.639.753.800,00	128.987.800,00	8,36	128.987.800,00	8,36
1 25	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000.000,00	291.000.000,00	0,00	507.987.000,00	507.987.000,00	218.987.000,00	74,56	218.987.000,00	74,56
2 01	URUSAN PILIHAN	136.081.000,00	136.281.000,00	200.000,00	0,14	2.798.643.000,00	8.598.821.000,00	11.213.264.000,00	3.710.713.000,00	13.643.788.500,00	17.354.601.800,00	8.141.237.500,00	54,78	8.141.237.500,00	54,78
2 01	Pertanian	136.081.000,00	136.281.000,00	200.000,00	0,14	2.708.643.000,00	7.989.821.000,00	10.676.264.000,00	3.710.713.000,00	9.674.805.000,00	13.285.918.000,00	2.809.254.000,00	24,42	2.809.254.000,00	24,42
2 01	Dinas Pertanian dan Kelautan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000.000,00	537.000.000,00	0,00	4.098.983.500,00	4.098.983.500,00	3.531.983.500,00	85,77	3.531.983.500,00	85,77
2 01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.938.000,00	1.902.800.000,00	3.747.738.000,00	2.233.887.000,00	1.880.735.000,00	4.114.622.000,00	388.884.000,00	9,78	388.884.000,00	9,78
2 02	Kehutanan	434.650.000,00	434.650.000,00	0,00	0,00	1.844.938.000,00	1.902.800.000,00	3.747.738.000,00	2.233.887.000,00	1.880.735.000,00	4.114.622.000,00	388.884.000,00	9,78	388.884.000,00	9,78
2 02	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	434.650.000,00	434.650.000,00	0,00	0,00	1.844.938.000,00	1.902.800.000,00	3.747.738.000,00	2.233.887.000,00	1.880.735.000,00	4.114.622.000,00	388.884.000,00	9,78	388.884.000,00	9,78
2 03	Energi dan Sumberdaya Mineral	10.915.000,00	10.915.000,00	0,00	0,00	910.373.000,00	852.800.000,00	1.463.173.000,00	748.737.000,00	1.693.922.800,00	2.410.889.800,00	947.486.800,00	64,78	947.486.800,00	64,78
2 03	Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup	10.915.000,00	10.915.000,00	0,00	0,00	810.373.000,00	447.800.000,00	1.058.173.000,00	748.737.000,00	717.980.000,00	1.464.717.000,00	408.544.000,00	38,41	408.544.000,00	38,41
2 03	Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00	945.842.800,00	945.842.800,00	540.842.800,00	133,56	540.842.800,00	133,56
2 04	Parwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	474.000.000,00	474.000.000,00	381.000.000,00	319,46	381.000.000,00	319,46
2 04	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Parwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	474.000.000,00	474.000.000,00	381.000.000,00	319,46	381.000.000,00	319,46
2 05	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.164.500,00	3.799.164.500,00	0,00	3.878.664.500,00	3.878.664.500,00	78.500.000,00	2,06	78.500.000,00	2,06
2 05	Dinas Pertanian dan Kelautan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.164.500,00	3.799.164.500,00	0,00	3.878.664.500,00	3.878.664.500,00	78.500.000,00	2,06	78.500.000,00	2,06
2 06	Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.600.000,00	270.600.000,00	0,00	366.470.000,00	368.470.000,00	88.870.000,00	35,47	88.870.000,00	35,47
2 06	Dinas Koperasi dan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.600.000,00	270.600.000,00	0,00	366.470.000,00	368.470.000,00	88.870.000,00	35,47	88.870.000,00	35,47
2 07	Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.120.000,00	244.120.000,00	0,00	393.366.000,00	393.366.000,00	149.246.000,00	61,12	149.246.000,00	61,12
2 07	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00	50,00
2 07	Dinas Koperasi dan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.120.000,00	224.120.000,00	0,00	363.366.000,00	363.366.000,00	139.246.000,00	62,13	139.246.000,00	62,13
2 08	Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000.000,00	434.000.000,00	0,00	540.158.000,00	540.158.000,00	108.158.000,00	24,46	108.158.000,00	24,46
2 08	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000.000,00	434.000.000,00	0,00	540.158.000,00	540.158.000,00	108.158.000,00	24,46	108.158.000,00	24,46

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	PEMBIAYAAN			PEMBIAYAAN			
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	SILPA TAB	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO
1	2	3	4	5	6	3	4	5
1	URUSAN WAJIB	10.153.781.326,15	9.133.000.000,00	1.020.781.326,15		51.137.922.443,00	9.133.000.000,00	42.004.922.443,00
1	Pemerintahan Umum	10.153.781.326,15	9.133.000.000,00	1.020.781.326,15		51.137.922.443,00	9.133.000.000,00	42.004.922.443,00
1	Sekretariat Daerah	10.153.781.326,15	9.133.000.000,00	1.020.781.326,15		51.137.922.443,00	9.133.000.000,00	42.004.922.443,00

Surplus/(Defisit)

